

**“PENEGAKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN  
DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2011-2014”.**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh

**ASRUL RUSLI**

NIM. 10500111036

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2015**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asrul Rusli  
NIM : 10500111036  
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkep, 07 Oktober 1991  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu Hukum  
Fakultas/Program : Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Jl. Kapasa Raya  
Judul : Penegakan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar Tahun 2011-2014".

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 09 September 2015

Penyusun

**ASRUL RUSLI**  
**NIM: 10500111036**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **ASRUL RUSLI**, NIM: 10500111036, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Penegakan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar Tahun 2011-2014”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 09 September 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Jumadi, S.H., M.H**  
NIP: 19630204 199403 1 003

**Dr. Muhammad Sabir, M.Ag**  
NIP: 19680228 199703 1 009

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Penegakan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar Tahun 2011-2014”. Untuk diajukan guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Strata Satu (S1) UIN Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan partisipasi baik dari pembimbing berupa bimbingan, motivasi, pikiran, tenaga, dan do'a dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan *support* sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, dan memberi semangat serta memberikan bantuan yang tak ternilai harganya.
2. Rektor UIN Alauddin Makassar, Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si, yang telah memberikan fasilitas penulis sehingga mampu menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (S1) UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II dan III atas segala fasilitas yang telah diberikan dan senantiasa memberikan dorongan, bimbingan dan nasehat kepada penulis.

4. Bapak Dr. Hamsir, S.H., M.Hum dan Ibu Istiqamah, S.H.,M.H selaku ketua dan sekertaris jurusan Ilmu Hukum serta Staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah membantu dan memberikan petunjuk terkait dengan pengurusan akademik sehingga penyusun lancar dalam menyelesaikan semua mata kuliah dan penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Jumadi, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Dr. Muhammad Sabir, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan konstribusi Ilmu dan bimbingannya kepada penulis penyusunan skripsi ini
6. Ambo Laba, Asdar, Andi Baso Adrian p, sebagai sahabat yang selalu memberikan *support*, nasehat, dan motivasi sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini, masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu Penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya melengkapi skripsi ini. Sebagai akhir, semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya bagi kita semua.

Makassar, 09 September 2015

Penyusun

**Asrul Rusli**  
**NIM. 10500111036**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1-11</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS .....</b>	<b>12-29</b>
A. Tinjauan tentang Tata Kelola Daerah .....	12
1. Pengertian Tata Kelola Daerah .....	12
2. Konsep Tata Kelola Daerah .....	13
B. Tinjauan tentang Retribusi .....	14
1. Objek Retribusi Daerah .....	12
2. Bukan Objek Retribusi Daerah .....	18
3. Fungsi Retribusi .....	18
4. Golongan Retribusi Daerah .....	19
5. Karakteristik Retribusi .....	20
6. Tujuan Retribusi Daerah .....	20
7. Pelayanan .....	21
C. Dasar Hukum Pelayanan Sampah .....	23
1. Ketentuan Undang-undang tentang Pengelolaan dan Pelayanan Persampahan .....	23
2. Ketentuan perda No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayana persampahan/kebersihan .....	25
D. Kerangka Konseptual .....	27
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>30-32</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	30
B. Pendekatan Penelitian .....	30
C. Sumber Data .....	31
D. Metode Pengumpulan Data .....	31
E. Instrumen Penelitian .....	32
F. Teknik Pengolaan dan Analisis Data .....	32
G. Pengujian Keabsahan Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33-56</b>
A. Gambaran Umum Dinas Petamanan dan Kebersihan (DPK) .....	33
1. Deskripsi Lokasi .....	33

2. Fungsi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar .....	34
3. Struktur dan Uraian tugas Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar .....	34
4. Visi dan Misi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar .....	38
B. Penegakan Perda Nomor 11 tahun Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan di Kota Makassar.....	39
C. Penghambat Penegakan Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan di Kota Makassar .....	50
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57-58</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Implikasi Penelitian.....	58
<b>KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>59-60</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>70</b>



## ABSTRAK

**Nama : Asrul Rusli**  
**Nim : 10500111036**  
**Jurusan : Ilmu Hukum**  
**Judul : Penegakan Perda No. 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.**

---

Penelitian ini membahas tentang “Penegakan Perda No. 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan” Penelitian ini bertujuan mengetahui penegakan perda No. 11 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kota Makassar dan hambatan yang dihadapi dalam penegakan perda No. 11 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Metode yang digunakan dalam penyusunan ini, yaitu metode pengumpulan data melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan yakni mengumpulkan data dan wawancara secara langsung dengan ketua, pegawai dan staf kantor dinas kebersihan dan pertamanan Kota Makassar. Sementara penelitian pustaka dilakukan dengan mengkaji dan mencari referensi, perundang-undangan, artikel dan sumber yang berhubungan dengan penegakan perda No. 11 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kemudian dikaji dengan menggunakan teknik kualitatif. Dalam menguji data dan materi yang disajikan maka pengujian keabsahan data yang digunakan yaitu: 1) deskriptif digunakan untuk menguraikan dan memperjelas bunyi peraturan daerah, 2) komperatif digunakan untuk membandingkan perbedaan pendapat, 3) deduktif digunakan sebagai metode penelitian yang berpedoman pada aturan perundang-undangan.

Hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini, yaitu: 1) penegakan peraturan daerah (Perda) No. 11 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kota Makassar belum efektif karena masih terdapat kekurangan terhadap peraturan daerah No. 11 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/Kebersihan. 2) faktor penghambat penegakan peraturan daerah No. 11 Tahun 2011 antara lain, kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi persampahan/ kebersihan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, banyaknya wajib retribusi yang tidak mau membayar dan tidak mampu membayar retribusi persampahan/kebersihan dan masih ditemukan pihak yang memungut liar.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab sebagaimana telah diatur dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Tujuannya demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Ini berarti dengan adanya otonomi, daerah diberikan kewenangan penuh untuk membuat sejumlah kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan aspirasi masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan maupun pendapatan daerah.

Berkaitan dengan itu, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. sebagai bentuk perwujudan peraturan perundang-undangan tersebut, maka daerah membuat produk kebijakan yang terkait dengan retribusi guna meningkatkan pendapatan berdasarkan potensi yang ada di daerah. Salah

satu jenis retribusi yang cukup potensial adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan seperti yang dilakukan oleh pemerintah kota makassar dengan menerbitkan peraturan daerah kota makassar No. 11 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Dalam peraturan daerah tersebut, dijelaskan bahwa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi sampah adalah biaya yang dipungut pemerintah daerah sebagai imbalan atas pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah yang meliputi pengambilan sampah dari sumbernya, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, serta penyediaan lokasi pembuangan akhir. Peraturan daerah kota makassar No. 11 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ini pada dasarnya terdiri dari 2 aspek yaitu tentang pengelolaan sampah dan retribusi sampah.


Mempertimbangkan luasnya cakupan peraturan daerah tersebut, maka peneliti lebih memfokuskan pada retribusi sampah. Pertimbangan ini karena didasarkan bahwa:

1. Berdasarkan pengamatan awal peneliti, berbagai penelitian terdahulu, tema sampah lebih banyak memfokuskan pada pengelolaannya, tidak membahas retribusinya sehingga menjadi hal yang kurang menarik untuk diteliti.
2. Kebijakan retribusi sampah dalam konteks otonomi daerah belum banyak di ambil oleh pemerintah daerah di indonesia untuk meningkatkan PAD. Kota makassar menjadi salah satu kota yang mengambil pilihan untuk melakukan kebijakan tersebut.

3. Dalam retribusi, ada biaya yang harus dibayar oleh masyarakat terhadap keberlangsungan kebijakan tersebut sehingga pelayanan dan tanggung jawab atas kewenangan yang dilimpahkan walikota kepada dinas kebersihan dan pertamanan selaku pelaksana kebijakan dapat terkontrol (*checks and balances*) sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Ditetapkannya peraturan daerah ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan jumlah penduduk di kota makassar dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang mengakibatkan bertambahnya volume sampah sehingga jasa atas pelayanan persampahan/kebersihan menjadi sangat strategis dan diperkirakan akan terus meningkat. Data yang dikeluarkan badan pusat statistik kota makassar, jumlah penduduk kota makassar pada tahun 2014 mencapai 1.4 jt jiwa. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa potensi sampah di kota makassar cukup besar seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Permasalahan tersebut juga menjadi fokus penyelesaian utama pula bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tanggungjawab di bidang persampahan/kebersihan.

Selain alasan di atas dalam Al-quran pun dijelaskan untuk menjaga bumi ini dengan tidak membuat kerusakan sebagaimana penjelasan dalam Q.S al A'raf/7 :56 Allah berfirman:



Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.<sup>1</sup>

Dalam surat Al-A'raf yang terkandung dalam tafsir Departemen Agama dijelaskan bahwa Allah SWT melarang manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi, seperti merusak sesama manusia, alam sekitar dan sebagainya. Bumi ini diciptakan oleh Allah SWT dengan segala kelengkapannya yang ditujukan untuk keperluan hidup manusia di muka bumi demi kesejahteraan mereka. Maka dari itu manusia dilarang merusak sesamanya, maupun alam sekitar yang mampu menyambung kehidupannya. Anjuran untuk berbuat baik itu sudah tertanam dalam Al-Qur'an yang diwariskan oleh Allah SWT kepada Rasulnya yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Saw.

Adapun beberapa tafsir yang menjelaskan terkait Surah Al A'raaf ayat 56 yaitu sebagai berikut;

a. Tafsir Al-Mishbah dalam Surah Al A'raaf ayat 56

Dalam ayat ini Allah SWT, melarang jangan membuat kerusakan di permukaan bumi. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang, merusak pergaulan, merusak jasmani dan rohani orang lain, merusak penghidupan dan sumber-sumber penghidupan, (seperti bertani, berdagang, membuka perusahaan dan lain-lainnya). Padahal bumi tempat hidup ini sudah dijadikan Allah cukup baik. Mempunyai gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai, lautan, daratan dan lain-lain yang semuanya itu dijadikan Allah untuk manusia

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), h. 125.

agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai dirusak dan dibinasakan. Selain dari itu untuk manusia-manusia yang mendiami bumi Allah ini, sengaja Allah menurunkan agama dan diutusny para nabi dan rasul-rasul supaya mereka mendapat petunjuk dan pedoman dalam hidupnya, agar tercipta hidup yang aman dan damai. Dan terakhir diutus-Nya Nabi Muhammad SAW, sebagai Rasul yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam.<sup>2</sup> Bila manusia-manusia sudah baik, maka seluruhnya akan menjadi baik, agama akan baik, negara akan baik, dan bangsa akan baik.

b. Tafsir Al-Maraghi Surat Al-A'araf Ayat 56

Penjelasan tafsir jalalain melalui ayat tersebut yaitu janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan kemusyrikan dan perbuatan-perbuatan maksiat sesudah Allah memperbiakinya dengan cara mengutus rasul-rasul dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut terhadap siksa-Nya dan penuh harap terhadap-Nya sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik yakni orang-orang yang taat. Dan janganlah kalian merusak di muka bumi setelah Allah membuat kemaslahatan padanya dengna menciptakan hal-hal yang bermanfaat dan menunjuki manusia cara mengeksploitasi bumi dan memanfaatkannya, dengan menundukkan bumi itu kepada mereka.<sup>3</sup>

c. Tafsir Al-Ashar Surat Al-A'araf Ayat 56

Tugas kekhalifahan manusia di muka bumi adalah untuk mengelola segala makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi secara adil,

<sup>2</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol.5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 46.

<sup>3</sup>Ahmad Mustofa, *Tafsir al-Maraghi* (Semarang: CV. Thoha Putra, 1993), h. 221-222.

berkeseimbangan bagi pelestarian keberlangsungan hidup seluruh makhluk ciptaan Allah, karena itu manusia dilarang melakukan kerusakan di muka bumi, sebagaimana firman Allah yaitu janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah ia cocok untuk kehidupan.<sup>4</sup>

Perbuatan manusia yang tidak berdasar syariat dalam mengelola bumi dapat menimbulkan kerusakan dan berdampak negatif yang mengancam kelangsungan hidup manusia, karena itu Allah telah memberikan karunia kepada manusia berupa akal pikiran, perasaan, dan tubuh untuk menjalankan tugas kekhalifahannya dalam memelihara kelangsungan hidup makhluk Allah di bumi.

Sesuai dengan penjelasan ayat di atas maka kita sebagai hamba di muka bumi ini sudah sepatutnya untuk menjaga muka bumi termasuk membersihkan sampah sebagaimana dalam hadits yaitu *لَطُفُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ* (Kebersihan adalah sebagian dari iman) yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (261H) dalam kitab sahihnya pada pembahasan "*At-Thaharah*" bab *fadhul wudhu*'.<sup>5</sup> Agar masyarakat pun dapat menghirup udara segar dan di perintahkan pula untuk menjaga muka bumi ini dari kerusakan, termasuk menjaga lingkungan dan melestarikannya namun di balik semua itu sudah sepatutnya ada retribusi untuk pengelola kebersihan sekaligus bentuk pendapatan asli daerah untuk melakukan perbaikan penataan wilayah kota agar lebih baik dan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan lainnya. dan ayat tersebut sangat berkaitan dengan di keluarkannya kebijakan pemerintah kota makasssar dalam bentuk perda pengelolaan sampah di

---

<sup>4</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), h. 56.

<sup>5</sup>Umar Mansyur, <http://umar-arahimy.blogspot.com/2011/12/kebersihan-bagian-dari-iman.html>. (Diakses pada hari selasa 29 Juni 2015).

kota makassar yaitu perda No. 11 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan di kota makassar. Selama berlangsungnya kebijakan ini, potensi yang cukup besar dari retribusi sampah ini bisa di optimalkan oleh pemerintah kota makassar untuk melakukan perbaikan terkait lingkungan hidup. Maka dari itu masyarakat sudah seharusnya melaksanakan perda tersebut demi kabaikan bersama.

Data dinas kebersihan dan pertamanan kota makassar dalam 4 tahun terakhir menyebutkan bahwa pendapatan retribusi sampah di kota makassar dari tahun 2011 hingga tahun 2014 tidak pernah mencapai target dan cenderung mengalami penurunan. Tidak tercapainya target pendapatan retribusi sampah menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi DKP Kota Makassar. Belum maksimalnya pelayanan yang di berikan sebagai *feedback* atas beban biaya yang dibayarkan masyarakat dalam hal pelayanan persampahan. Alasan pemilihan fokus penelitian dan berbagai kendala yang muncul sejak kebijakan retribusi sampah ini dilaksanakan membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar Tahun 2011-2014”**.

#### ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai penegakan perda No. 11 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di kota makassar tahun 2011-2014.

Mengenai penggambaran fokus penelitian yang hendak diteliti oleh penulis yang pertama adalah terkait penegakan retribusi sampah di Kota Makassar sebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah No. 11 Tahun 2011 tentang pelayanan sampah dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Selanjutnya fokus penelitian yang kedua adalah hambatan yang di hadapi pemerintah dalam penegakan perda Kota Makassar No. 11 Tahun 2011.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan latar belakang di atas tersebut, maka pokok pembahasan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana penegakan perda No. 11 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kota Makassar?
2. Hambatan apa sajakah yang dihadapi pemerintah dalam penegakan perda No. 11 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan?

### **D. Kajian Pustaka**

Berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini yaitu penegakan perda No. 11 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di kota makassar tahun 2011-2014, telah ada beberapa literatur yang membahas terkait masalah tersebut, namun belum ada literatur yang membahas secara khusus tentang judul skripsi ini begitu pula dengan penelitian-penelitian ilmiah sebelumnya. agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut:



1. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah

2. Marihot Siahaan, dalam bukunya "*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*" membahas mengenai retribusi daerah dan karakteristik retribusi serta tujuan dari pemungutan daerah hal ini memfokuskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi tertentu dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil.

3. HAW Widjaja, dalam bukunya berjudul "*Otonomi Daerah dan daerah Otonom*" berkaitan dengan judul penelitian yang akan di bahas yang menjelaskan bahwa inti dari konsep Otonomi Daerah yaitu upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang mengambat pelaksanaan Otonomi Daerah. Dengan demikian, tuntutan masyarakat dapat terwujud secara nyata dengan

penerapan Otonomi Daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fisik nasional.

4. Dalam “Undang-undang 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa pengelolaan sampah saat ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwaasan lingkuan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Hal ini menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensi dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.
5. Ahmad Mustofa, dalam bukunya berjudul “*Tafsir al-Maraghi*” berkaitan dengan judul yang dibahas tentang pelayanan persampahan termasuk pengelolaan, pada dasarnya manusia dilarang melakukan kerusakan di muka bumi sebagaimana tugas manusia untuk merawat memelihara dan menjaga bumi ini.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Mengacu dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak di capai peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan perda No. 11 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kota Makassar.
2. Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi pemerintah dalam penegakan perda No. 11 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi pemerintah dan masyarakat yang terkait dengan masalah penegakan perda No. 11 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan diharapkan tulisan ini dapat menjadi tambahan pengetahuan mengenai penegakan perda sehingga dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi mengenai penegakan perda baik itu bagi akademisi maupun bagi praktisi dibidang hukum tanpa menutup kemungkinan bagi pihak manapun yang memiliki ketertarikan dibidang ini.



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Tinjauan tentang Tata Kelola Daerah

##### 1. Pengertian Tata Kelola Daerah

Tata kelola daerah atau pemerintahan yang lebih dikenal dengan sebutan *good governance*, secara umum pengertiannya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup> *Good governance* tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua lembaga baik pemerintahan maupun non-pemerintahan.

Tata kelola pemerintahan adalah suatu penyelenggaraan management pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan *legal* dan *political frame work* bagi kebutuhan kretifitas usaha.

Orientasi tata kelola daerah yang baik adalah:

1. Orientasi ideal, yaitu negara yang diarahkan untuk pencapaian nasional.

Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara

---

<sup>1</sup>Sedarmayanti, *Good governance* (Pemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah (Bandung: PT. Bandar Maju, 2003), h. 3.

dengan elemen konstituennya seperti legitimasi dan akuntabilitas

2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu efektif dan efisien dalam melakukan upaya untuk mencapai tujuan nasional. Orientasi ini bergantung sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Menurut UNDP tata kelola daerah adalah sebagai suatu latihan (*exercises*) dari kewenangan politik ekonomi dan administrasi untuk menata, mengatur, mengelola masalah-masalah sosialnya.<sup>2</sup>

## **2. Konsep Tata Kelola Daerah**

Tata kelola daerah atau *good governance* secara umum menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tata kelola daerah dapat ditinjau dari segi fungsional dan pemerintah. Dari segi fungsional dari aspek *governance*, yaitu apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuannya yang telah digariskan atau justru sebaliknya dimana pemerintah tidak berfungsi secara efektif dan terjadi efisiensi.<sup>3</sup> Untuk itu diperlukan dasar yaitu:

1. *Economic governance*, yang meliputi pembuatan keputusan (*decision making process*) yang memfasilitasi *equity* (kesetaraan), *poverty* (kesejahteraan dan *quality of life* (kualitas hidup)).
2. *Political governance* adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan

---

<sup>2</sup>Sedarmayanti, *Good governance* (Pemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah. h. 4.

<sup>3</sup>Sedarmayanti, *Good governance* (Pemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah. h. 5.

3. *Administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan dari segi pemerintah (*government*), tata kelola daerah dapat dilihat dari aspek sebagai berikut, yaitu:

- a. Hukum yaitu: kebijakan yang ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik dan ekonomi.
- b. *Administrative competence* dan *transparency* yaitu: kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model administratif serta keterbukaan informasi.
- c. *Desentralisasi* yaitu: desentralisasi regional dan desentralisasi di dalam departemen.
- d. Penciptaan pasar yang kompetitif yaitu: penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan sekmen lain dalam sektor swasta, deregulasi dan kemampun pemerintah dalam mengelola makro ekonomi.<sup>4</sup>

#### **B. Tinjauan tentang Retribusi**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 angka 64 menyebutkan pengertian Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi tertentu dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma.

---

<sup>4</sup>Sedarmayanti, *Good governance* (Pemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah. h. 5.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 26 menyatakan bahwa:

“Di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.<sup>5</sup>

Retribusi ini berdasarkan atas peraturan yang berlaku, yakni dalam bentuk peraturan daerah dan untuk menaatinya yang berkepentingan dapat dipaksa (paksaan ekonomis) yaitu, barang siapa yang ingin menggunakan/mendapat jasa tertentu dari pemerintah, maka ia wajib membayarnya. Pembayaran inilah yang disebut retribusi. Cara pembayaran kadang tidak dengan uang melainkan materai, misalnya akte untuk menangkap ikan, berburu. Untuk memperoleh akte itu, yang bersangkutan harus/diwajibkan membeli materai. Misalnya juga pada retribusi pelayanan kesehatan, yang ada hanyalah paksaan secara ekonomis, yaitu hanya pasien yang membayar retribusi yang ditetapkan saja yang berhak mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Bila tidak membayar, dia tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan pada rumah sakit pemerintah tersebut. Hal ini berarti hak untuk mendapatkan jasa dari pemerintah didasarkan pada pembayaran retribusi yang telah ditetapkan oleh orang yang menginginkan jasa tersebut. Jadi, setelah seseorang membayar retribusi maka seseorang ini berhak mendapatkan tegen prestasi secara langsung.

---

<sup>5</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 26* (Lembaran Negara).

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia Marihot P. Siahaan adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenan,
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah,
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya,
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan,
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.<sup>6</sup>

Dari pengertian retribusi di atas, dapat disimpulkan bahwa Retribusi merupakan pungutan oleh pejabat retribusi kepada wajib retribusi yang bersifat memaksa dengan tegan prestasi secara langsung dan dapat dipaksakan penagihannya. Memaksa disini artinya paksaan dari segi ekonomi yaitu, hanya yang membayar retribusi yang menikmati balasjasa dari negara. Orang-orang yang tidak menggunakan jasa-jasa pemerintah yang telah disediakan, tidak wajib membayar retribusi.

Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah. Setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah harus membayar retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Akan tetapi, tidak ada paksaan secara yuridis kepada pasien (anggota masyarakat) untuk membayar retribusi karena setiap orang bebas untuk memilih pelayanan kesehatan yang diinginkannya.

---

<sup>6</sup>Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 7.



Sama halnya dengan penjelasan di atas, bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **1. Objek Retribusi Daerah**

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu. Hal ini membuat objek retribusi terdiri dari tiga kelompok jasa sebagaimana disebut di bawah ini:

- a. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintahan.
- b. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.
- c. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Mengingat bahwa fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi

dari sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga peizinan tertentu masih dipungut retribusi.<sup>7</sup>

## **2. Bukan Objek Retribusi Daerah**

Jasa yang menjadi objek retribusi hanyalah jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara langsung. Apabila adalah jasa yang diselenggarakan oleh perangkat pemerintah daerah, tetapi tidak secara langsung, misalnya oleh BUMD, jasa tersebut tidak dikenakan retribusi. Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 19, jasa yang diselenggarakan oleh BUMD bukan merupakan objek retribusi. Jasa yang telah dikelola secara khusus oleh suatu BUMD tidak merupakan objek retribusi, tetapi sebagai penerimaan BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya BUMD merupakan Badan Usaha yang dimiliki oleh daerah, tetapi dalam melaksanakan kegiatannya berdiri secara mandiri dan terlepas dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, jasa yang diberikan oleh BUMD bukanlah jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Apabila BUMD memanfaatkan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah, BUMD wajib membayar retribusi daerah.

## **3. Fungsi Retribusi**

Retribusi hanya semata-mata untuk mengisi kas negara maupun daerah sebagai penggantian yang telah dikeluarkan dalam upaya penyediaan sarana pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dilarang memungut retribusi kepada masyarakat tatkala tidak memanfaatkan sarana pelayanan yang disediakan. Misalnya, terhadap masyarakat yang tidak menggunakan pasar

---

<sup>7</sup>Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. h. 434.

sebagai tempat melakukan kegiatan ekonomi, pemerintah dilarang memungut retribusi pasar.<sup>8</sup>

#### **4. Golongan Retribusi Daerah**

Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat dilakukan penggolongan retribusi daerah. Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, Pasal 18 ayat (2) retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut dibawah ini:

- a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. h. 16.

<sup>9</sup>Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. h. 346.

Golongan atau jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria tertentu. Penetapan jenis-jenis retribusi jasa umum dan jasa usaha dengan peraturan pemerintah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. Penetapan jenis-jenis retribusi perizinan tersebut, walaupun merupakan kewenangan pemerintah daerah, tetap memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi teknis terkait.

#### **5. Karakteristik Retribusi**

- a. Retribusi dipungut dengan berdasarkan peraturan-peraturan (yang berlaku umum).
- b. Dalam retribusi, prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan mendapatkan jasa timbal langsung yang ditujukan pada individu yang membayarnya.
- c. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkait dengan retribusi yang bersangkutan.
- d. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.<sup>10</sup>

#### **6. Tujuan Dari Pemungutan Retribusi**

- a. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam pengelolaan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>10</sup>Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. h. 34.

- b. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan, penyelenggaraan pemerintahan, dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.
- c. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pemungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan retribusi daerah.<sup>11</sup>

## 7. Pelayanan

Pengertian pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai kegiatan atau usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah, “membantu menyiapkan atau mengurus segala sesuatu yang dibutuhkan orang lain”.

Menurut Moenir, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia berusaha, baik melalui aktivitas sendiri maupun secara tidak langsung melalui aktivitas orang lain. Aktivitas adalah suatu proses penggunaan akal, pikiran, panca indera dan anggota badan dengan atau tanpa alat bantu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang di inginkan baik dalam bentuk barang maupun jasa, proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas yang langsung inilah yang dinamakan pelayanan.<sup>12</sup>

Pelayanan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain. Sedangkan, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberi layanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

---

<sup>11</sup>Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. h. 35.

<sup>12</sup>Moenir H.A.S, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 16.

Di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pelayanan adalah instansi pemerintah dimana penyelenggara pelayanan publik tersebut mempunyai tugas atau fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan jasa pelayanan.

Pelayanan publik juga diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan BUMN/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Menurut Daryanto pelayanan adalah cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan jasa. Pelayanan adalah memberikan layanan jasa atau memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan.<sup>13</sup>

Menurut Haryatmoko mendefinisikan pelayanan publik ialah:

“Semua kegiatan yang pemenuhannya harus dijamin, diatur dan diawasi oleh pemerintah, karena diperlukan untuk perwujudan dan perkembangan kesaling-tergantungan sosial, dan pada hakikatnya, pewujudannya sulit terlaksana tanpa campur tangan kekuatan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ikatan sosial, mengikis egoisme yang tidak rasional

---

<sup>13</sup>Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Apollo, 1998), h. 363.

untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sosial dalam rangka pencapaian tujuan kolektif”.<sup>14</sup>

Pengertian pelayanan publik perlu memperhitungkan unsur-unsur,

Haryatmoko sebagai berikut:

- a. Pelayanan publik merupakan pengambil alihan tanggung jawab oleh kolektivitas atas sejumlah kekayaan, kegiatan atau pelayanan dengan menghindari logika milik pribadi atau swasta karena tujuannya pertama-tama bukan mencari keuntungan.
- b. Pelayanan publik mempunyai beragam bentuk organisasi hukum, baik di dalam maupun di luar sektor publik. Ada pula yang berbentuk perusahaan swasta, asosiasi-asosiasi yang berasal dari inisiatif pribadi atau swasta diakui memiliki fungsi pelayanan publik (organisasi keagamaan, asosiasi nirlaba).
- c. Pelayanan publik, merupakan lembaga rakyat yang memberi pelayanan kepada warga negara, memperjuangkan kepentingan kolektif, dan menerima tanggung jawab untuk memberi hasil. Berusaha memajukan kesejahteraan publik dan menumbuhkan kepercayaan untuk mengusahakan kesejahteraan bersama merupakan bagian dari pelayanan public.
- d. Kekhasan pelayanan publik terletak dalam upaya merespons kebutuhan publik sebagai konsumen.<sup>15</sup>

### **C. Dasar Hukum Pelayanan Sampah**

#### **1. Ketentuan Undang-undang tentang Pengelolaan dan Pelayanan Persampahan**

- a. Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945

Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang dasar Negara tahun 1945

memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat undang memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik tentang pengelolaan sampah dan pelayanan persampahan/ kebersihan, hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggungjawab dibidang pengelolaan dan pelayanan persampahan meskipun secara oprasional pengelolaan dan pelayanan

---

<sup>14</sup>Haryatmoko, *Etika Publik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Indah, 2011), h. 13.

<sup>15</sup>Haryatmoko, *Etika Publik*. h. 14.

dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu usaha organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak dibidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan dan pelayanan sampah dalam rangka menyelenggarakan pelayanan persampahan secara terpadu dan komprehensif, memenuhi hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintahan daerah itu melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pelayanan sampah dalam undang-undang ini berdasarkan asas tanggungjawab, azas berkelanjutan, bermanfaat, keadilan kesadaran, kebersamaan, keselamatan keamanan dan nilai ekonomi.<sup>16</sup>

b. Undang-undang No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah muncul dari konsiderans menimbang sebagai berikut:

- 1) Bahwa pertambahan pendudukan dan perubahan konsumsi menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam.
- 2) Bahwa pengelolaan sampah saat ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan
- 3) Bahwa sampah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensi dan terpadu dari hulu ke hilir agar

---

<sup>16</sup>Aan Andri Yana, <http://andri94yana.blogspot.com/2012/05/hak-kewajiban-serta-tanggung-jawab.html> (Diakses pada hari kamis 11 Juni 2015).



memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat; dan

- 4) Bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara profesional, efektif dan efisien.<sup>17</sup>

Dalam penjelasan undang-undang No. 18 tahun 2008 dijelaskan bahwa pertumbuhan penduduk dan perubahan konsumsi menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam dan pengelolaan sampah saat ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sehingga segala sesuatu terkait persampahan harus mendapatkan penanganan, pengelolaan dan pelayanan tersendiri agar tercipta lingkungan hidup yang sehat serta menjaga lingkungan dan melestarikannya.

## **2. Ketentuan perda No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan**

Peraturan Daerah Kota Makassar No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan dengan dasar pertimbangan diadakannya perda tersebut dapat dijelaskan dalam konsideran menimbang sebagai berikut;

- a. Bahwa pertumbuhan jumlah penduduk Kota yang semakin besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang tidak terkendali menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan

---

<sup>17</sup>Anonim, *Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*, Jakarta. Graha Ilmu, 2008), h. 44.

karakteristik sampah yang semakin beragam, yang apabila tidak dikelola dengan optimal akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan

- b. Bahwa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c. Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 14 Tahun 1999 Seri B Nomor 4) dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi dewasa ini sehingga perlu ditinjau untuk ditetapkan kembali sesuai Peraturan-perundangan yang berlaku
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.<sup>18</sup>

Dalam Penjelasan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 Bahwa pertambahan jumlah penduduk Kota yang semakin besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang tidak terkendali menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, yang apabila tidak dikelola dengan optimal akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Jadi pengelolaan sampah harus secara operasional pengelolaan dapat bermitra dengan badan selain itu organisasi persampahan dan kelompok masyarakat dapat juga diikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan dan pelayanan sampah. Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di wilayah kota Makassar salah satunya usaha untuk mewujudkan kota Makassar sebagai kota yang bersih, sehat, rapih dan indah sesuai dengan visi dan misi yang harus dilakukan terus menerus dan berkesinambungan dan sebenarnya keberada

---

<sup>18</sup>Republik Indonesia, Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 *tentang Retribusi Pelayanan Kersampahan/kebersihan*, Kota Makassar (Lembaran Negara).

Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 bukanlah yang baru yang mengatur hukuman denda maupun penjara bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Harapan sama, agar cinta kebersihan menjadi budaya orang Makassar Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 hendaknya tidak hanya mengatur masyarakat tetapi juga intprovesi bagi semua tentang peran masing-masing dalam menciptakan kebersihan. namun di balik semua itu sudah sepatutnya ada retribusi dari setiap jenis bentuk pelayanan dan besarnya tarif. Dan terkait dengan jenis bentuk pelayanan dan besarnya tarif tercantum dalam perda No. tahun 2011 bagian kelima pasal 9 besar tarif retribusi persampahan/kebersihan Kota Makassar

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual ini menjelaskan pengertian-pengertian dari istilah yang akan ditulis dalam penulisan ini guna membatasi ruang lingkup dalam penulisan yaitu:

*"Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan"* dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Persampahan/Kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

*"Penegakan peraturan daerah"* adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau terlaksananya fungsi aturan daerah secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara khususnya disuatu wilayah.

*"Peraturan daerah (Perda)"* merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perda

ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi /kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

*“Retribusi Daerah”* adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jenis retribusi tertentu dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil/dan atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma.

Penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 telah memiliki Jenis bentuk pelayanan dan besarnya tarifnya berdasarkan aturan hukum dan perundang-undangan demi Terlaksananya Retribusi dan Pelayanan Persampahan di kota makassar dengan baik sesuai harapan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan bagan dibawah ini:

## Bagan



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara.

Penelitian ini pelaksanaannya dilakukan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar di jalan Urip Sumoharjo, dikarenakan peraturan daerah ini menjadi kewenangan dan tanggungjawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Makassar dalam usaha pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

##### ***B. Pendekatan Penelitian***

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*Sociologys Legal Research*). Secara yuridis dengan mengkaji Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar tahun 2011-2014.

Secara sosiologi dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang dipandang dari segi penerapan.

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

1. Penelitian pustaka (*library research*) dengan melakukan telaah mendalam atas buku, karya ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang sesuai dengan objek yang diteliti.
2. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan objek yang diteliti.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Adapun mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber sebagai sumber informasi yang telah memiliki pengalaman terkait penerapan perda Nomor 11 tahun 2011 untuk mengetahui tanggapan, pendapat, pengalaman, keyakinan, serta harapan narasumber yang berkaitan dengan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan di Kota Makassar tahun 2011-2014.
2. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode pencatatan dokumen-dokumen sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Dalam melengkapi data penelitian yang akan digunakan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan alat rekam suara selama wawancara dengan narasumber maupun pihak yang terkait mengenai judul yang penulis angkat dalam skripsi ini

### ***F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data***

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sistem analisis data secara kualitatif dan kemudian dipaparkan secara deskriptif.

Analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk lebih mendapatkan gambaran nyata yang selanjutnya akan disajikan secara deskriptif mengenai Penegakan Perda No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar Tahun 2011-2014.

### ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Dalam menguji data dan materi yang disajikan, dipergunakan metode sebagai berikut:

1. Deskriptif digunakan dalam menguraikan, mengutip atau memperjelas bunyi peraturan perda dan uraian umum.
2. Koperatif digunakan untuk membandingkan perbedaan pendapat, terutama terhadap materi yang mungkin dapat menimbulkan ketidaksepahaman serta dapat menimbulkan kerancuan.
3. Deduktif yang pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum tentang Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DPK)***

##### **1. Deskripsi Lokasi**

Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DPK) Kota Makassar merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab dibidang persampahan yang diharapkan akan lebih kaya dengan fungsinya agar dapat memberikan inspirasi dan imajinasi dalam mengakomodasi dan memfasilitasi kepentingan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang pengelolaan kebersihan dan ruang terbuka hijau (RTH) serta pemakaman.

Pembentukan Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DPK) Kota Makassar sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 7 Juni 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah institusi ini memiliki tugas dan fungsi yang sangat luas dalam mengakselerasikan hasil pembangunan mendukung terciptanya pelestarian lingkungan hidup, karena itu kapasitas kinerjanya diharapkan akan lebih efektif dan efisien.

Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DPK) Kota Makassar mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kebersihan dan pertamanan sehingga mampu meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

## **2. Fungsi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar**

Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar mempunyai fungsi pokok Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sebagai berikut:

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan umum di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (*dekorasi*) kota, penyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah
- b. Penyusunan rencana dan program pembinaan, pengembangan di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (*dekorasi*) kota, penyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah
- c. Penyusunan rencana dan program pengkoordinasian dan kerja sama dengan pihak terkait di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (*dekorasi*) kota, penyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah
- d. Penyusunan rencana dan program penertiban, peningkatan peran serta masyarakat di bidang pertamanan, penghijauan, tata keindahan (*dekorasi*) kota, penyelenggaraan kebersihan/persampahan, pengelolaan pemakaman dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah
- e. Pelayanan perizinan pemakaman Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
- f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas dan Pembinaan unit pelaksana teknis

## **3. Struktur dan Uraian Tugas Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar memiliki perangkat organisasi yang tercantum dalam struktur organisasi dengan uraian tugas sebagai berikut:

) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar.

) Sub Bagian Umum Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas.

) Sub Bagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis keuangan.

) Sub Bagian Perlengkapan

Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan barang.

) Bidang Pertamanan

Bidang Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan taman, tata keindahan taman (dekorasi) kota serta pembibitan.

) Seksi Pembangunan Taman

Seksi Pembangunan Taman mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, penataan dan pengembangan fungsi-fungsi taman kota.

) Seksi Pemeliharaan Taman

Seksi Pemeliharaan Taman mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan taman kota, pengawasan dan pengendalian tata keindahan (dekorasi) kota.

#### ) Seksi Pembibitan

Seksi Pembibitan mempunyai tugas melaksanakan pembibitan dan pengembangan tanaman hias dan pohon pelindung yang siap ditanam.

#### ) Bidang Penghijauan Kota

Bidang Penghijauan Kota mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan kawasan penghijauan kota, serta melaksanakan pengawasan dan pengusutan.

#### ) Seksi Pembangunan Kawasan Hijau

Seksi Pembangunan Kawasan Hijau mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengembangan dan evaluasi pengelolaan kawasan penghijauan kota.

#### ) Seksi Pemeliharaan Kawasan Hijau

Seksi Pemeliharaan Kawasan Hijau mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, pembinaan dan sosialisasi, partisipasi dan kerjasama pengelolaan kawasan penghijauan kota.

#### ) Seksi Pengawasan dan Pengusutan

Seksi Pengawasan dan Pengusutan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengusutan terhadap kegiatan yang diduga terdapat perbuatan melanggar hukum atas tindakan terhadap keselamatan kawasan dan jalur penghijauan kota.

) Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota

Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat, penyuluhan/pembinaan dan penyadaran masyarakat dalam bidang teknik Pengelolaan Kebersihan/Persampahan.

) Seksi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

Seksi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan masyarakat dalam penyelenggaraan kebersihan/persampahan.

) Seksi Pengembangan Partisipasi

Seksi Pengembangan Partisipasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kebersihan/persampahan kota.

) Bidang Penataan Kebersihan Kota

Bidang Penataan Kebersihan Kota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan teknik pengelolaan kebersihan kota, melaksanakan monitoring dan evaluasi Kebersihan Kota dan pemeliharaan peralatan dan alat berat.

) Seksi Pengembangan Teknik Pengelolaan Kebersihan Kota

Seksi Pengembangan Teknik Pengelolaan Kebersihan Kota mempunyai tugas melaksanakan penelitian/kajian, pengembangan sistem dan teknologi pengelolaan dalam penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota.

) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebersihan Kota

Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebersihan Kota mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan kebersihan/persampahan kota.

) Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Alat Berat

Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Alat Berat mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan pengendalian alat/peralatan dan alat berat.

**4. Visi dan Misi Dinas Pertamanan dan Kebersihan (DPK) Kota Makassar**

Tujuan dan sasaran organisasi dalam kurun waktu selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2011-2014 sebagai pijakan langkah tahapan perencanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan, untuk itu visi dan misi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar yang diintegrasikan dalam visi dan misi Pemerintah Kota Makassar, sebagai wujud atau bentuk masa depan yang diharapkan. Adapun visi dinas Pertamanan dan Kebersihan sebagai berikut:

) Visi

“Kota Makassar Nyaman, Hijau, Bersih dan Asri”

) Misi

Berdasarkan visi tersebut diatas pada hakekatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar ke depan, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

- Mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan persampahan/kebersihan yang berkelanjutan
- Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan system pengelolaan persampahan/kebersihan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dunia usaha/swasta dalam pengelolaan persampahan/kebersihan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam system pengelolaan persampahan / kebersihan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan prinsip *Good and Cooperate Governance*
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan persampahan/kebersihan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

**B. Penegakan Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kota Makassar**

Retribusi persampahan termasuk ke dalam jasa umum yaitu, jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam melaksanakan pelayanan retribusi kebersihan di Kota Makassar, Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar selaku pihak yang berwenang terhadap retribusi pelayanan kebersihan berpatokan terhadap standarisasi yang diterapkan oleh Badan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) yaitu, standar operasional pengelolaan sampah perkotaan dilakukan mulai dari pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan dan pemilahan sampah hingga ke pembuangan akhir sampah, kemudian kegiatan pemilahan dan daur ulang semaksimal mungkin dilakukan sejak dari pewadahan sampah dengan pembuangan akhir sampah. Kemudian dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyebutkan bahwa penanganan sampah sesuai dengan Pasal 14 meliputi pengolahan, pengumpulan, pengangkutan,

pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Inilah standarisasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar.

Ketentuan umum Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan pada wajib retribusi umumnya digunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam realitasnya pemungutan retribusi persampahan yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar menggunakan karcis berwarna kuning atau disebut juga dengan kwitansi yang besarnya nilai uang yang harus dibayar sudah melekat, dan hanya berlaku selama satu bulan apabila dilakukannya perbulan dan berlaku per dua minggu apabila pemungutannya dilakukan per dua minggu begitu juga jika dilakukan perminggu maka hanya berlaku selama seminggu. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi ini tidak dijelaskan lebih rinci pemungutan yang bagaimana yang seharusnya dilakukan perminggu ataupun per dua minggu ataupun perbulan, tetapi pihak dinas mengatakan bahwa biasanya pemungutannya dilakukan per bulan apabila terhadap pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu peraturan daerah masih harus dibenahi lagi terutama mengenai pemungutan retribusi sampah ini.

Petugas Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar memungut retribusi dengan cara mendatangi wajib retribusi dengan memberikan kwitansi



berwarna kuning sebagai bukti pembayaran yang sudah tercantum besarnya nilai uang yang harus dibayar.

Wajib retribusi yang dimaksud yaitu sesuai dengan Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sebagai berikut:

“Wajib retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi”.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar, struktur dan besar tarif retribusi persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan. Pemusnahan sampah rumah tangga, bangunan institusional, industri dan perdagangan ditetapkan retribusi sebagaimana table berikut:

No.	Jenis bentuk Pelayanan	Besarnya Tarif	Keterangan
1.	Pelayanan penyedotan dan pengangkutan limbah cair dan industri lainnya (perseptik tank/tangki)	Rp. 250.000	Pipa tidak lebih 25 m
2.	Sewa pipa penyedotan limbah tinja/ industry	Rp. 5.000	Per Meter Pipa
3.	Pelayanan angkutan sampah rumah rumah tangga ( <i>door to door</i> )	Rp. 25.000	Per m <sup>3</sup> secara manual/ bulan
4.	Pelayanan angkutan sampah komersial	Rp. 30.000	Per m <sup>3</sup> secara manual/ bulan

<sup>1</sup>Republik Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 *tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan*, Kota Makassar (Lembaran Negara).

5.	Pelayanan angkutan sampah luar biasa	Rp. 35.000	Per m <sup>3</sup> secara manual atau alat berat
6.	Pelayanan angkutan sampah kawasan perumahan elit dan jalan perkotaan	Rp. 50.000	Per m <sup>3</sup> secara manual/ bulan
7.	Pelayanan angkutan sampah Rumah toko diluar kawasan Perdagangan	Rp. 25.000	Per petak & satu lantai Setiap bulan
8.	Pelayanan angkutan sampah took dalam kawasan perdagangan	Rp. 40.000	Per petak & satu lantai setiap bulan
9.	Pelayanan angkutan sampah toko diluar kawasan perdagangan	Rp. 45.000	Per petak & satu lantai setiap bulan
10.	Pelayanan angkutan sampah rumah dan toko dalam dalam kawasan perdagangan	Rp. 60.000	Per petak & satu lantai setiap bulan
11.	Pelayanan angkutan container di atas ukuran 1 sampai dengan 6 m <sup>3</sup>	Rp. 150.000	Per 1 (satu) X Angkut
12.	Tempat pembuangan langsung TPA tinja (IPLT/IPAL)	Rp. 25.000	Satu kali membuang
13.	Tempat pembuangan langsung TPA sampah Taman-gapa	Rp. 20.000	Satu kali membuang
14.	Pelayanan angkutan sampah rumah tangga (membuang langsung ke konteiner)	a. Rp. 3.000	Diatas ½ m <sup>3</sup> secara manual per bulan
		b. Rp. 10.000	½ m <sup>3</sup> secara manual per bulan
		c. Rp. 8.500	Kurang ½ m <sup>3</sup> secara manual per bulan
15.	Pelayanan angkutan sampah penjual kaki lima	a. Rp. 10.000	Per bulan
		b. Rp. 5.000	Per 2 minggu
		c. Rp. 2.500	Per minggu

(Sumber: Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar)

Pasal 9 ini merupakan dasar yang menjadi patokan oleh dinas ataupun masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi. Menurut Buyung selaku Staf dibidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan menyatakan bahwa:

“Dari Pasal 9 di atas terdapat kerancuan diantaranya yaitu, pada point 1 dan 2 disebutkan bahwa limbah cair termasuk dalam pengertian sampah, artinya apa yang disebutkan antara pengertian sampah ini berbeda”.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, sehingga bukanlah menjadi suatu tugas dari dinas pertamanan dan kebersihan kota Makassar untuk melakukan penyedotan sampah cair tersebut. Selain itu juga ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah pada Pasal 1 Ayat (8) menyebutkan bahwa sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesifik, kemudian dalam Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa, sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Kemudian menurut Buyung selaku Staf dibidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan menyatakan bahwa:

"Dalam hal pelayanan pemungutan sampah pada kontainer seperti pada point 15 mengenai pembayaran sampah pedagang kaki lima, selisih antara pembayaran yang dilakukan perbulan kemudian per dua minggu dan per minggu sangat kecil nilai yang harus dibayar. Pasti masyarakat akan membayar sampah senilai Rp. 3000 perbulan dan ini sangat sedikit.

---

<sup>2</sup>Buyung (28 tahun), Staf dibidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan, Wawancara, Makassar, 05 September 2015.

Artinya pendapatan yang nantinya diperoleh dari retribusi sampah sangat sedikit jika petugas melakukan pemungutan perbulan. Seharusnya perda ini perlu diperbaiki lebih baik lagi. Dan juga tidak dijelaskan dalam peraturan daerah ini mengenai pembayaran yang seperti apa yang dilakukan per bulan, per dua minggu ataupun perminggu”.<sup>3</sup>

Kemudian dalam hal pengukuran sampah, pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar mengalami kesulitan dalam hal mengukur sampah-sampah karena tidak adanya alat ukur untuk mengukur sampah-sampah yang ada seperti layaknya pengukuran tarif air ataupun listrik, ini yang menjadi kendala dari pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar untuk menetapkan berapa besar sampah yang harus dibayar oleh masyarakat sesuai dengan jumlah timbulan sampahnya.

Adapun Perbandingan pelayanan retribusi dari setiap Perumahan dan Bukan perumahan di lima kecamatan di Kota Makassar yaitu:

1. Kecamatan Biringkanaya

Perumahan Bumi Permata Sudiang, di Perumahan ini pemungutan retribusi dilakukan perbulan oleh Pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dengan cara mendatangi wajib retribusi dan memberikan kwitansi atau kupon berwarna kuning kepada wajib retribusi dengan biaya Rp.10.000 dan berlaku selama sebulan. Adapun pengangkutan sampah di perumahan ini dilakukan sekali dalam seminggu. Bahkan biasanya petugas dinas sering terlambat mengangkut sampahnya, sehingga terjadi penumpukan sampah.

Pemukiman Kelurahan Sudiang, Tidak ada pemungutan retribusi di wilayah ini baik yang dilakukan oleh pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan

---

<sup>3</sup>Buyung (28 tahun), Staf dibidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan, Wawancara, Makassar, 05 September 2015.

Kota Makassar maupun oleh pihak lurah, RT/RW setempat. Masih banyak penumpukan sampah yang terjadi di wilayah tersebut dan biasanya masyarakat membuang sampah di kontainer yang telah disediakan. Dari pihak Dinas mengangkutnya di kontainer itu seminggu sekali.

#### 1. Kecamatan Tamalanrea

Perumahan Puri Asri, Pemungutan retribusinya dibayar di pos satpam setiap bulan dengan harga Rp.10.000 dan pengangkutannya dilakukan setiap senin dan kamis tetapi masih juga terdapat timbulan sampah di beberapa titik di wilayah ini. Biasanya juga petugas sering mengalami keterlambatan dalam mengangkut sampah.

Kelurahan Tamalanrea Indah, Pemungutannya dilakukan oleh RT/RW dengan mendatangi rumah-rumah yang besarnya retribusi dibayar adalah Rp. 25.000 perbulan dengan biaya keamanan. Di tempat ini pengangkutannya dilakukan seminggu dua kali yaitu setiap senin dan kamis.

#### 2. Kecamatan Panakuk kang

Perumahan Lili, Pemungutan retribusi di Perumahan Lili yaitu sebesar Rp.100.000 perbulan dilakukan oleh pihak RT/RW. Pembayaran retribusinya ini cenderung lebih mahal jika dibandingkan dengan perumahan lain seperti di Perumahan Puri Asri dan Perumahan Bumi Permata Sudiang yang masing-masing membayar Rp.10.000 perbulan. Tetapi pengangkutan sampah di perumahan ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan perumahan Bumi Permata Sudiang dan Perumahan Puri Asri, yang dilakukan setiap hari oleh pihak RT/RW, sehingga di Perumahan Lili ini tidak ada penumpukan sampah.

Kelurahan Tallo Baru, Tidak ada pemungutan Retribusi di wilayah ini, dan biasanya masyarakat membuang sampah di kontainer yang telah disediakan oleh pihak Dinas, dan pengangkutannya dilakukan sekali dalam seminggu. Jika petugas terlambat dalam mengangkut sampah maka sampahnya itu akan berserakan dan biasanya jatuh di sungai karena kontainer yang disediakan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar berdekatan dengan sungai.

### 3. Kecamatan Rappocini

Pemukiman Kelurahan Tidung, tidak ada retribusi di pungut di wilayah ini oleh pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar tetapi biasanya ada tukang sampah yang dibayar untuk mengangkut sampah tetapi bukan dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan. Biasanya masyarakat membayar Rp. 5000 setiap kali tukang sampahnya itu mengangkut sampah.

Pemukiman Kelurahan Mapala, Sama halnya dengan di pemukiman kelurahan Tidung. Di kelurahan ini tidak ada pemungutan sampah dilakukan oleh pihak Dinas tetapi oleh pihak Lurah, RT/RW. Dan pembayarannya langsung diberikan kepada petugas dengan harga Rp. 5.000 tanpa menggunakan karcis/kupon.

### 4. Kecamatan Mamajang

Pemukiman Kelurahan Bonto Lebang, Tidak ada retribusi di wilayah ini baik oleh pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar maupun pihak Lurah, RT/RW. Masyarakat di wilayah ini apabila membuang sampah biasanya di kontainer sampah yang dekat dan apabila jauh warga lebih memilih membakarnya jika timbulan sampahnya menumpuk.

Pemukiman Kelurahan Mandala, Tidak ada retribusi sampah di wilayah ini baik oleh Pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan ataupun oleh Pihak RT/RW. Biasanya masyarakat melakukan pembuangan sampah di dekat sungai dikarenakan tidak ada tempat penyediaan kontainer sampah di wilayah ini. Sehingga banyak penumpukan sampah di wilayah ini terutama di bagian sungai banyak sekali ditemukan sampah-sampahnya. Apalagi sungai tersebut juga berdekatan dengan pasar. Efek dari penumpukan sampah di wilayah ini menimbulkan bau busuk dan kurangnya nilai estetika.

Jika dibandingkan tingkat kebersihannya, maka retribusi yang di pungut oleh pihak Lurah, RT/RW lebih efektif dan bersih jika dibandingkan dengan pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Oleh pihak RT/RW dilakukan setiap hari pengangkutan sampahnya. sedangkan oleh pihak Dinas sekali dalam seminggu dengan pemungutan retribusi yang murah tetapi tidak setiap hari diangkut sampahnya.

Pemungutan yang dilakukan oleh pihak Lurah, RT/RW ini sebenarnya belum diatur oleh Peraturan Daerah, oleh karena, itu pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar masih ingin melakukan perbaikan terhadap peraturan daerah ini. Jika pihak Lurah, RT/RW yang melakukan pemungutan retribusi harus ada keseimbangan pembagian retribusi. Contohnya, pihak Lurah, RT/RW apabila melakukan pemungutan retribusi diharapkan retribusinya itu dibagi dua antara pihak Kelurahan, RT/RW dan Pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan, supaya antara pihak kelurahan, RT/RW dan pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan mendapat keuntungan, tetapi pada kenyataannya tidak begitu. Sehingga pihak

Dinas Pertamanan dan Kebersihan merasa perlu adanya perbaikan terhadap peraturan daerah agar memasukan kebijakan oleh pihak Lurah, RT/RW dalam sebuah peraturan daerah sehingga lebih jelas tugas dari masing-masing.

Memasukan kebijakan Lurah, RT/RW dalam sebuah peraturan Daerah agar pihak Lurah, RT/RW tidak melakukan pungutan liar (pungli). Selain itu, pihak dinas juga ingin memasukan kerjasama antara pihak Dinas dan Lurah, RT/RW dalam melakukan pemungutan retribusi agar sama-sama memiliki peran dan keuntungan masing-masing guna keefektifan dari pelayanan retribusi itu sendiri dan juga agar masyarakat benar-benar merasakan pelayanan yang maksimal.

Adapun mengenai keterlambatan dalam pengangkutan sampah, menurut Kussaiyeng selaku Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar menjelaskan bahwa, “keterlambatan pengangkutan sampah terkait masalah teknis mobil pengangkutan yang sering mengalami kerusakan, termasuk juga volume sampah sudah melebihi kondisi yang biasanya sekitar 600 ton sehari. Selain itu, keterlambatan juga terjadi jika pengawas kontainer di setiap kecamatan terlambat melaporkan. Sekedar diketahui bahwa petugas pengawas kontainer di setiap kecamatan bertugas untuk melaporkan kepada petugas pengangkut sampah Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar bahwa kontainer sudah *full*.

Sejauh ini pelaksanaan dari pemungutan retribusi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan, dimana retribusi yang ditargetkan masih belum terealisasi sepenuhnya, seperti dalam tabel berikut:



Tabel 2 Daftar Penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kota Makassar dari tahun 2011-2014

No.	Tahun	Yang ditargetkan	Yang Terealisasi	% Realisasi
1	2011	Rp. 1.952.172.000	Rp.1.718.511.500	88,03%
2	2012	Rp. 5.449.655.000	Rp.3.826.964.120	70,22%
3	2013	Rp. 5.596.163.000	Rp.3.705.187.560	66,21%
4	2014	Rp. 5.596.163.000	Rp.3.804.416.400	67,98%

(Sumber: Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar)

Berdasarkan table tersebut, menyatakan bahwa penerimaan retribusi selama 4 (empat) tahun terakhir yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan, hal ini menurut Buyung, dikarenakan masih banyaknya warga yang tidak melakukan pembayaran terhadap retribusi sampah ini, ada juga yang membayar tetapi membayar ke pihak lain selain pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar. Sehingga target yang telah ditetapkan dalam pemungutan retribusi masih belum terealisasi.

Sedangkan dalam hal penanganan sampah bisa dilihat pada table berikut:

Tabel 3 Daftar Perbandingan Penanganan Sampah Kota Makassar Dalam Kurun Waktu 4 (empat) tahun terakhir:

No.	Tahun	Timbulan Sampah	Tertangani	% Terhadap Timbulan
1	2011	3.680,03 M3/Hari	3.278,12 M3/Hari	89,08%
2	2012	3.781,23 M3/Hari	3.373,42 M3/Hari	89,21%
3	2013	3.923,52 M3/Hari	3.520,07 M3/Hari	89,72%
4	2014	4.057,28 M3/Hari	3.642,56 M3/Hari	89,78%

(Sumber: Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa penanganan sampah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari presentase timbunan sampah pada bagan diatas. Artinya bahwa pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sudah mulai memperbaiki kinerjanya dalam melakukan penanganan terhadap sampah selama lima tahun guna menjadikan Kota Makassar sebagai Kota *Green and Clean* seperti yang dicita-citakan.

Kerjasama Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dengan pihak swasta hanyalah dalam bentuk pengolahan sampah misalnya dengan PT. Gikoko kerjasama program CDM Flaring Gas kemudian dengan PT. Orgindo yaitu kerjasama program LRR Landfill Resouece Recovery (Produk Kompos Organik), kemudian kerjasama dengan PT. Unilever Indonesia, PT. Media Fajar dan Yayasan Peduli Negeri (YPN) melakukan program “Makassar *Green and Clean* (MGC)”, yang tujuan utamanya mengajak masyarakat kota untuk selalu menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan di sekitar.

### ***C. Penghambat Penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar***

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar, penegakan dari suatu produk hukum dapat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor substansi atau materi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar, faktor aparatur penegak hukum

terkait yaitu, Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, faktor prasarana yang berupa fasilitas guna menunjang pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan faktor masyarakat yang berdomisili di kawasan perumahan maupun di kawasan bukan perumahan.

#### 1. Faktor Substansi Peraturan Daerah

Substansi hukum dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai retribusi pelayanan persampahan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Makassar. Penegakan hukum yang dibuat sangat berpengaruh terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga untuk mengatur tingkat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kota Makassar dilihat dari keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan yaitu pengaturan tentang retribusi dilaksanakan berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dengan dokumen sejenis yang dipersamakan. Masih banyaknya kekurangan yang menyebabkan tidak maksimalnya pemungutan retribusi persampahan di Kota Makassar.

Tidak adanya aturan yang jelas mengenai siapa yang harus melakukan pemungutan retribusi ini menyebabkan banyaknya pungutan-pungutan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan pemungutan retribusi. Sehingga banyaklah terjadi pungutan liar (pungli) terhadap retribusi sampah ini.

Menurut Buyung selaku pihak dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar menyarankan agar pihak-pihak yang melakukan pungutan retribusi mungkin pihak RT/RW ataupun Lurah setempat harus ada keseimbangan dalam hal pembagian keuangan artinya bahwa hasil dari pembayaran retribusi yang diterima oleh pihak-pihak RT/RW atau Lurah dibagi bersama dengan pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan agar sama-sama merasakan manfaatnya.

Mengingat bahwa Pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar pun selalu melakukan pengangkutan sampah baik secara komunal maupun individual, jadi sampah yang diangkut oleh pihak RT/RW ataupun Lurah itu diangkut pula oleh pihak Dinas Kebersihan pada Kontainer sedangkan pihak dinas tidak mendapatkan pembayaran dari retribusi sampah ini. Untuk itu agar lebih maksimalnya pelayanan retribusi sampah dari pihak dinas kebersihan kepada masyarakat perlu adanya keseimbangan dalam pembagian tugas. Kemudian tidak adanya aturan yang jelas mengenai keterlambatan ataupun siapa yang harus melakukan pemungutan retribusi. Sehingga membuat Perda ini sulit untuk diterapkan karena tidak ada pasal yang menjelaskan sanksi dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

## 2. Faktor Aparatur Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum dalam penelitian ini adalah Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Kota Makassar yang memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan terhadap persampahan, yang salah satu tugasnya yaitu bertanggung jawab terhadap persampahan baik itu dalam memungut retribusi maupun memberikan pelayanan berupa mengangkut sampah baik secara komunal

maupun individual. Sejauh ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar memberikan pelayanan terhadap semua warga masyarakat baik yang tinggal di perumahan maupun yang tinggal bukan di perumahan. Tetapi kurang maksimalnya pengawasan dari pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar sehingga pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu tidak dapat diawasi.

Menurut pengamatan penulis, penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran seperti pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak mendapat tindakan yang tegas, misalnya melakukan pungutan retribusi sampah dengan tidak menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) dari pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar.

Hal ini dibenarkan oleh pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, mereka mengatakan bahwa pungutan liar terjadi di banyak tempat ketika pihak tertentu hendak melakukan pengangkutan sampah kemudian dari masyarakat langsung memberikan retribusi kepada pihak tersebut. hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan. Lemahnya pengawasan ini terjadi karena untuk mengawasi pelaksanaan pungutan tersebut dibutuhkan banyak tenaga pengawas, sedangkan tenaga pengawas yang dimiliki hanya terbatas dalam hal jumlah dan fasilitas.

Menurut Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar mengatakan bahwa, jumlah petugas kebersihan yang ada hanya 560 orang,

sedangkan kebutuhan idealnya yaitu 1000 orang untuk mengurus sampah di 143 kelurahan di Kota Makassar, serta anggaran kebersihan di Kota Makassar. Maka dari itu diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah, agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Pengawasan itu sendiri mempunyai tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak;
- b. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dijumpai oleh kepala daerah dan para penyelenggara pemerintahan di daerah, sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan dikemudian hari;
- c. Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memperbaiki kesalahan;

Pengawasan dilakukan untuk mendorong harmonisasi antara kebutuhan atau keinginan rakyat dengan para penyelenggara pemerintahan di daerah. Untuk menyinergikan antara program atau kebijakan pemerintah daerah. Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial, melalui pengawasan, maka dapat diketahui apakah sesuatu berjalan dengan rencana sesuai dengan intruksi atau asas yang telah ditentukan, sehingga dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki.

### 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Pelayanan Retribusi yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar memang belum maksimal karena adanya faktor

kurangnya sarana dan prasarana. Sejauh ini jumlah armada pengangkut sampah masih terbatas jumlahnya belum lagi ditambah dengan banyaknya armada pengangkut sampah yang rusak karena kelebihan muatan kemudian jumlah dari petugas dinas kebersihan yang masih kurang. Karena terlalu banyaknya wilayah di Makassar yang memerlukan pelayanan kebersihan sehingga fasilitas kurang memadai menyebabkan kurang efektifnya pelayanan persampahan di Kota ini.

Menurut Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar bahwa:

“Pihak Dinas memiliki 151 armada pengangkutan sampah 3 rusak total dan 40 sering mogok termakan usia. Dan akan ditambah 10 unit mengingat tingginya volume sampah di Kota Makassar. Sebagai pembanding, anggaran kebersihan di Kota Surabaya mencapai 200 Miliar per tahun sementara Makassar Cuma 20 Miliar Per Tahun. Itu sudah termasuk biaya operasional, gaji hingga pemeliharaan peralatan dan prasarana angkutan sampah”.<sup>4</sup>

#### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat dalam masyarakat yang mempengaruhi penegakan suatu Peraturan Perundang-undangan yaitu tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat yang menyebabkan tidak efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang dimaksud yaitu masyarakat Kota Makassar yang belum sadar akan penting pembayaran retribusi persampahan ini, karena akan berpengaruh terhadap pelayanan baik itu pengangkutan ataupun pengelolaan.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat terlihat dari banyaknya masyarakat yang membayar retribusi sampah walaupun tanpa menggunakan Surat

---

<sup>4</sup>Abd. Azizi Hasan (53 tahun), Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 06 September 2015.

Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagaimana disebutkan. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan dari masyarakat akan adanya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai retribusi sampah ini. Mereka hanya memikirkan asalkan sampahnya diangkut tanpa melihat apakah yang melakukan itu dari Dinas Pertamanan dan kebersihan ataupun tidak. Selain itu, menurut Bapak Buyung masih banyak juga masyarakat yang tidak mau membayar dan tidak mampu membayar retribusi.

Kemudian menurut Andi Murtan selaku Kepala Bidang Bina Kebersihan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar menjelaskan bahwa:

“Pola pembuangan sampah oleh masyarakat saat ini belum tertib, sebagai contoh jika ditentukan penjemputan sampah jam 5 sore sampai jam 7 malam, itu sering tidak dipatuhi, kemudian kontainer sudah banyak lagi sampahnya, padahal sudah disampaikan. Jadi memang belum tertib”.<sup>5</sup>

Ketidapatuhan masyarakat terhadap jadwal-jadwal yang telah ditetapkan terhadap penjemputan sampah juga belum terlaksana karena masih banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui, dan tidak ada juga aturan yang jelas mengenai jadwal tersebut. Sebenarnya penghasilan Kota Makassar dari retribusi sampah akan jauh lebih tinggi jika kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi itu sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah, tapi hal ini belum terlihat, terbukti dengan adanya pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu selain dari pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar.

---

<sup>5</sup>Andi Murtan (51 tahun), Kepala Bidang Bina Kebersihan Dinas Pertamanan dan Kebersihan, *Wawancara*, Makassar, 06 September 2015.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis menarik dapat kesimpulan bahwa:

1. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar belum efektif. Karena masih terdapat kekurangan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Kemudian masih terdapat pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan secara umum masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan daerah ini.
2. Faktor penghambat penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 antara lain, kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi persampahan/kebersihan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, banyaknya wajib retribusi yang tidak mau membayar dan tidak mampu membayar retribusi persampahan/kebersihan dan masih ditemukan pihak yang memungut liar sehingga masyarakat tidak mau membayar untuk kedua kalinya kepada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar.

#### **B. Implikasi Penelitian**

1. Kepada pihak Pemerintah Daerah kota Makassar untuk mengkaji kembali Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan karena terdapat beberapa pasal yang bertentangan

2. Kemudian diperlukan pengawasan yang ketat dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bisa ditindaklanjuti.
3. Kemudian mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang akan diterapkan sehingga masyarakat tahu kepada siapa mereka membayar retribusi dan berapa yang seharusnya mereka bayar dan juga masyarakat lebih mengetahui aturan dan kewenangan dari masing-masing pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aan Andri Yana, <http://andri94yana.blogspot.com/2012/05/hak-kewajiban-serta-tanggung-jawab.html> (Diakses pada hari kamis 11 Juni 2015).
- Anonim. “*Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*”. Jakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Daryanto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo, 1998.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
- Haryatmoko. *Etika Publik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Indah, 2011.
- H.A.S, Moenir. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Moleong, 2002.
- Mustofa, Ahmad. *Tafsir al-Maraghi*. Semarang: CV. ThoHa Putra, 1993.
- P. Siahaan, Marihot. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan. Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- Sedarmayanti, *Good governance* (Pemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: PT. Bandar Maju, 2003.
- Sejati, Kuncoro. *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*, Vol.5. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siahaan, Marihot . *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kulitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Widjaja, Haw. *Otonomi Daerah dan daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.

